

BAB III

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI)

A. SEJARAH BERDIRINYA ICMI

Pembentukan ICMI merupakan tonggak penting dalam hubungan akomodatif antara Islam dan negara karena dalam organisasi ini bertemu tokoh-tokoh yang ada diluar birokrasi dengan yang ada didalam birokrasi. Sehingga ada yang menyebutkan aliansi antara cendekiawan muslim dengan birokrasi.

Menelusuri jejak sejarah berdirinya ICMI harus dipandang dari dua sisi yang saling berkaitan: Selain dari sejarah proses pembentukannya, juga dari sisi kultural. Pertama, melihat dari proses peristiwa pembentukan ICMI secara kronologis dari sejak diideakan hingga terbentuknya suatu badan. Kedua, melihat secara kultural maksudnya latar belakang sejarah perjuangan panjang cendekiawan muslim, dari kebangkitan hingga upayanya untuk tampil ketengah dinamika politik nasional, membentuk asosiasi sesamanya yang pernah beberapa kali gagal sehingga pada saat kesempatan itu datang maka keniscayaan itupun terjadi. Pemahaman terhadap kedua sudut pandang ini diharapkan membentuk kesan bahwa proses terbentuknya ICMI lewat simposium cendekiawan muslim di Malang memiliki mata rantai yang panjang dengan terobosan perjuangan kultural cendekiawan muslim masa-masa sebelumnya.

1. Proses Kronologis Berdirinya ICMI

ICMI terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan perjuangan yang tak kenal lelah. Awalnya dari hasrat mengadakan simposium dengan tema: "Sumbangsih cendekiawan muslim menuju era tinggal landas", oleh lima orang mahasiswa fakultas teknik Universitas Brawijaya Malang.⁶² Mereka itu adalah Erik Salman G.D., Ali Mudzakir, M. Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal dimana sebelumnya telah diciptakan semacam kondisi yang kondusif oleh Imaduddin Abdulrahim atau sering dikenal dengan Bang Imad.⁶³

Simposium itu rencananya dibuat kecil-kecilan, diulirkan lewat Unit Aktifitas Kerohanian Islam (UAKI) Unibraw. Pada saat rencana ini dihadapkan kepada Prof. Dr. Ika Rohdjatun Sastrahidayat dosen Unibraw dan DR. Fuad Amsari ekolog Universitas Airlangga, gagasan itu dianggap kurang besar. Kedua tokoh cendekiawan muslim Al-Falah (CMF) itu menyarankan agar simposium diselenggarakan secara nasional, dengan mendatangkan B.J. Habibie dan Imaduddin Abdulrahim.⁶⁴

62. Editorial, Simposium Cendekiawan Muslim, *Angkatan Perbenjata*, edisi 8 desember 1990, diambil dari klipin mass media cetak tentang ICMI; Abrar Muhammad ed. *ICMI Dan Harapan Umat*, YPI Ruhama, jakarta, 1991, hal. 14

63. Laporan, Terpilihnya Orang Dekat pak. harto, *Editor*, no. 14, 15 Desember 1990 (Abrar Muhammad, hal. 87)

64. Laporan, Menggelar sebuah Ide Besar, *Prospek*, No. 11, 8 Desember 1990, hal. 12-13

Bang Imad, mantan ketua harian masjid Salman ITB dan pelopor mendirikan MSC (Moslem Student Club) di Amerika ini, menanggapi proposal simposium dengan sangat antusias. Ia bahkan mengoreksi proposal yang akan dibawa ke Habibie, bersama-sama Drs. M. Dawam Rahardjo, bang Imad mengusulkan agar para Mahasiswa itu meluaskan gagasan dari sekedar mendeklar simposium menuju pendirian sebuah asosiasi nasional bagi cendekiawan muslim.⁶⁵

Selain menemui Habibie, Bang Imad mengusulkan agar menemui juga Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim agar memimpin konferensi nasional itu. Ketaatan Emil Salim terhadap Islam, dan reputasinya sebagai tokoh toleran dan baik hati dikenal luas dikalangan media nasional. Bang Imad dan para mahasiswa secara pribadi tidak kenal sama Prof. Habibie, namun telah mengenal baik wawancaranya di televisi dan cerita tentangnya di majalah muslim populer Kiblat, dimana menteri berbicara secara hangat mengenai Islam.⁶⁶

Pada pertemuan selanjutnya, Emil Salim setuju menghadiri simposium nasional tetapi menolak memimpin organisasi itu, dengan berkeras bahwa ia terlalu tua dan Habibie akan lebih efektif dan energik, kembali para mahasiswa berpaling pada Habibie untuk memimpin organisasi itu.

65. Ibid

66. Robert W. Hefner, Op-Cit, hal. 38, bandingkan dengan Simposium Cendekiawan Muslim, *Angkatan Bersenjata*, 8 Desember 1990.

Atas saran Nurcholish Madjid, akan dinamai ISMI (Ikatan Sarjana Muslim Indonesia).⁶⁷

Dihubungi melalui surat dan telephon, Habibie menolak bertemu dengan kelima mahasiswa itu. Menurut pembantu dekatnya, ia secara pribadi memprotes, "Bagaimana saya melakukannya? saya seorang insinyur dan seorang pembuat pesawat terbang, bukan pakar islam!". Ia dilaporkan juga telah mengungkapkan ketakutan bahwa dengan menyetujui untuk memimpin organisasi itu ia mungkin melanggar harapan presiden Soeharto.

Hanya setelah Habibie dihubungi oleh mantan Menteri Aqama Alamsyah Ratu Perwiranegara maka ia setuju menemui para mahasiswa. Saran Imaduddin pula yang membuat para mahasiswa menundukkan keinginan Habibie melalui Alamsyah.

Para mahasiswa dan pendukungnya diberi kesempatan bertemu Habibie, maka pada 23 agustus 1990, para mahasiswa ditemani Imaduddin, dawam rahardjo dan M. Syafi'i Anwar diterima Habibie di gedung BPPT jl. Thamrin no. 8 Jakarta.⁶⁸ Para mahasiswa dan pendukung mereka langsung menyampaikan daqasan, yang menurut salah satu dari mereka yang hadir, pertemuan berjalan seperti sebuah monolog panjang dan gelisah. Setelah itu, habibie memberikan tanggapan positif

67. Nurcholish Madjid, Habibie Ganti S. Menjadi C (Cak. Nur jlentrehkan Riwayat nama ICMI), *Jawa Pos*, 17 oktober 1991, hal. 1

68. A. Makmur Makka, ICMI Bukan Rekayasa Dari Atas, *Berita Buana*, 16 Februari 1991 (Abrar Muhammad, hal. 215)

pada gagasan tersebut dan mensyaratkan petisi dukungan untuk diedarkan dikalangan tokoh-tokoh cendekiawan muslim bagi kepemimpinannya pada organisasi tersebut, sehingga bisa mengesankan Presiden bahwa seruan mereka didukung oleh masyarakat muslim secara luas. Kecuali itu ia meminta garis besar organisasi asosiasi dan tujuannya untuk disampaikan kepada Presiden. "Saya membantu Presiden", katanya, "Sehingga saya harus meminta izin beliau untuk bekerja sama dengan kalian".⁶⁹

Pada saat ini sudah bisa dikatakan memasuki fase pembagian tugas. Habibie melakukan pendekatan ditingkat supra struktur politik termasuk pada Pak harto, para mahasiswa dan pendukungnya melakukan pendekatan pada cendekiawan dalam bentuk susunan draft dan dukungan tertulis. Ringkasnya dapat disimpulkan bahwa kelahiran ICMI terjadi melalui tiga tahap yang berkaitan yaitu, prakarsa mahasiswa, dukungan sejumlah cendekiawan dan pendekatan Habibie ditindak lanjut suprastruktur politik.

Dukungan resmi yang diminta oleh Habibie itu disusun dalam bentuk draft dan diberi kata pengantar oleh M. dawam Rahardjo. Ketika diedarkan ternyata surat dukungan itu mendapat sambutan luar biasa. Awal september Erik dkk. mampu mengumpulkan nama 34 orang termasuk mereka yang dari Malang, Surabaya, Bogor dan Bandung, kemudian ditambah 6 orang dari BPPT dan terakhir 9 orang dari Yogyakarta. Maka

69. Robert W. Hefner, Op-Cit, hal. 40

lengkaplah para penandatangan itu 49 orang dan ini dikenal dengan "49 sponsor ICMI". Pada saat ini simposium berubah topik menjadi "Industrialisasi dan transformasi tata nilai masyarakat Indonesia".⁷⁰

Pada saat yang hampir bersamaan, Habibie membicarakan masalah itu dengan sejumlah rekannya di Kabinet dalam rangka mencari dukungan. Dr. Saleh Afiff (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) mendukung dan menasehati agar langsung menghadap Presiden Soeharto. maka berikutnya pertemuan dengan Presiden dijadwalkan dengan lebih dulu mengirimkan petisi dan garis besar tujuan Asosiasi tersebut.⁷¹

Pertemuan itu berlangsung empat mata dan memakan waktu selama enam jam. Konon Presiden Soeharto setuju dan mendukung rencana itu, bahkan dia mendemonstrasikan penilaian pribadi tentang Islam yang semakin mendorong habibie untuk melangkah. Berangkat dari sini Habibie tampil dengan mandat penuh dari Presiden untuk memimpin asosiasi islam.⁷²

Pada tanggal 27 september 1990 dalam pertemuan dike diamannya, habibie menyatakan bahwa Pak harto merestui pencalonannya dan menulisukan wadah tersebut diberi nama

70. A. Makmur makka, Loc-Cit.

71. Robert W. Hefner, *Op-Cit*, hal 41

72. I b i d, hal 42

Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, disingkat ICMI⁷³. Selain itu bersama enam menteri dan dua orang cendekiawan, Habibie bertemu dengan pak harto untuk meminta kesediaannya membuka simposium tersebut.

Keesokan harinya diadakan lagi pertemuan yang berhasil menyepakati pembentukan "Tiga Team kelahiran ICMI". Tim pertama tentang kerangka acuan dan desain simposium, diketuai oleh M. Dawam Rahardjo; Tim kedua tentang Anggaran Dasar, diketuai oleh Muslimin Nasution; Dan tim ketiga tentang program kerja, diketuai oleh Dr. Sri Bintang Pamungkas. Sedangkan sebagai ketua panitia ditunjuk DR. Z.A Ahmady M.P.A, rektor Unibraw.

Pada tanggal 25-26 november 1990, atas prakarsa Pusat Pengkajian Strategis dan Kebijakan (PPSK) Yogyakarta, 22 orang cendekiawan yang dalam rangka proses penggodokan pembentukan ICMI bertemu di Tawangmangu Solo merumuskan beberapa usulan GBHN 1993 dan pembangunan jangka panjang tahap ke-II 1993-2018, serta rancangan program kerja dan struktur organisasi⁷⁴.

Sementara di Jakarta sejak akhir september 1990 tim Anggaran Dasar telah berhasil menyusun konsepnya bersama

73. *Tempo*, 8 Desember 1990 dinukil dari Abrar Muhammad (ed.), Op-Cit, hal 221-224

74. Editor, no. 23, 16 februari 1991, lihat Abrar muhammad (ed.), I b i d, hal 132. Struktur Organisasi ini menimbulkan polemik antara Dawam rahardjo dengan Habibie. Dawam bersikeras membentuk Sekjen, sedang Habibie memutuskan membentuk matriks. Polemik ini akan dibahas berikutnya.

dengan dua tim lainnya. Hasil rumusan mereka didialogkan dengan habibie di rumah Menristek selama lebih dari 7 jam. Setelah itu, diadakan persiapan final yang tidak kurang melibatkan beberapa departemen kementerian, MUI, BPPT, sejumlah cendekiawan dan hartawan muslim. Dengan demikian, persiapan telah dimatangkan.

Simposium dibuka tanggal 6 desember 1990 oleh Presiden Soeharto dengan tema "Membangun Masyarakat Indonesia -Abad ke-21", dihadiri oleh tujuh orang menteri⁷⁵, Pangab Jenderal Try Sutrisno dan 512 cendekiawan muslim dari berbagai disipli ilmu dan profesi dari seluruh Indonesia. Penutupannya dilakukan dua hari kemudian oleh Wapres Sudharmono. Sejarah mencatat, dalam masa Orde Baru inilah yang pertama kali bahwa pertemuan cendekiawan dibuka oleh Presiden dan ditutup oleh wakil Presiden.

Sebagaimana telah direncanakan simposium itu berakhir dengan kesepakatan untuk membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Sebagai ketua merangkap formatur terpilih Prof. Dr. B.J. Habibie. Selain itu simposium juga membahas bahan diskusi dari 12 penyaji yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penting sebagai bahan penyusunan program serta visi dan kebijakan yang dapat membimbing

75. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal 332, Para menteri itu antara lain, Mesesneg Moerdiono, Mendikbud Fuad hasan, Menag Munawir Sjadzali, Menpen Harmoko, Meneq K.L.H. Emil salim, Menhub Azwar Anas, Dan Menko Kesra Alamsyah ratu Perwiranegara.

ICMI.⁷⁶

Simposium ini oleh beberapa kalangan dianggap sangat istimewa, selain alasan diatas juga ada beberapa pertimbangan yang lain. Kemungkinan antara lain:

Pertama, bahwa yang bersimposium adalah para cendekiawan muslim dimana mereka itu merupakan kelompok elite dari sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beraqama Islam, disertai para pejabat tinggi negara yang notabene secara politis mereka dimintoskan sebelumnya saling berhadapan.

Kedua, selama ini sementara pendapat mengatakan bahwa kalangan islam kurang mendapat porsi kesempatan yang memadai dalam upaya menampilkan peranannya terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Ketiga, pada sepuluh tahun terakhir ini pertumbuhan kalangan intelektual terasa begitu pesat, sekaligus diiringi dengan timbulnya kesadaran keislaman para kaum terpelajar yang menggembirakan.

Keempat, pembangunan masyarakat menuju era industrialisasi karena kemajuan dibidang teknologi dan informasi yang secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan dampak adanya pergeseran nilai, maka peranan agama begitu sangat diperlukan.

Kelima, adanya keinginan dan kesadaran para cende-

76. Editorial, Hasil-hasil Pemikiran Simposium Cendekiawan Muslim Di Malang, *Kompas*, 10 desember 1990 (Abrar Muhamad, hal. 72)

kiawan muslim untuk bergabung dalam satu wadah dalam upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranannya bagi pembangunan ummat dan bangsa dimasa depan ⁷⁷

Tentu saja dari kelima faktor tersebut tidak dapat diabaikan adanya figur B.J. Habibie sebagai salah satu faktor pendorong yang menentukan bagi keberhasilan simposium dan sekaliqus terbentuknya wadah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

2. Perjalan Kultural Cendekiawan Muslim.

Kaum santri yang terdidik dengan keilmuan sekuler tanpa melepaskan baju kesantriannya, telah kita kenal sejak zaman penjajahan Belanda. Mereka mengkaji islam secara Kaffah kauliyah maupun kauniyahnya, sadar akan keterbelakangan islam dan masyarakat muslim. Mereka itulah bibit-bibit cendekiawan muslim, yang saat itu masih berkembang secara lokal kedaerahan.

Kaum terpelajar muslim mulai membangun asosiasi tingkat nasional diawali oleh Jong Islamieten Bond (JIB) yang ikut membidani lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Kemudian pada zaman kemerdekaan lahir organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) pada tanggal 4 mei 1947 dipelopori oleh pelajar dan mahasiswa islam di Yogyakarta, seperti A. Timur

77. Natsir Zubaidi, "ICMI, Kenyataan Sejarah", *Suara masjid*, no. 196, januari 1991, dinukil dari Abrar Muhammad, Ibid hal 164

Jaelani, M. Halim Tuasikal, Yusdi Ghazali dkk. Disamping itu sebelumnya telah lahir pula organisasi mahasiswa islam pada tanggal 5 februari 1947 dikota yang sama dengan nama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan pendirinya antara lain: Lafran Pane, A. Timur jaelani, Ahmad Tirtosudiro dan lain-lain.⁷⁸

Pada saat itu aktifitas cendekiawan muslim masih langka, masih dalam taraf membangun generasi, terhitung cendekiawan berbobot nasional seperti H. Agus salim, M. Natsir, Hamka, Moh Roem dan beberapa tokoh elite NU dan Muhammadiyah serta beberapa tokoh lain dalam jumlah yang sedikit. Lembaga-lembaga Mahasiswa dan pelajar yang eksis pada saat itu berfungsi sebagai persemaian bibit-bibit cendekiawan muslim masa berikutnya. Dikemudian hari tercatat Nurcholish Madjid, M. dawam rahardjo, Imaduddin Abdul-rahim para sponsor berdirinya ICMI ini tumbuh dan berkembang dari organisasi-organisasi tersebut dan masih banyak lagi tokoh yang lain.

Kemudian muncul tokoh-tokoh yang dikenal sebagai modernis islam angkatan pertama yang melanjutkan studi di Barat setelah memiliki basis pendidikan islam. Cendekiawan yang tampil pada periode ini diantaranya: H.M. Rasyidi di Universitas Shorbone Prancis, Harun Nasution dan Mukti Ali di Mc. Gill University Kanada. Kemudian diikuti oleh gener-

78. Natsir zubaidi, Op-Cit. (Abrar Muhammad, hal. 161-164)

asi yang lebih muda seperti Anton Timur Jaelani dan Kafrawi Ridwan⁷⁹

Pada tahun-tahun antara 70-80 an muncul tokoh angkatan yang lebih muda, memiliki visi perjuangan modernisme islam kearah pembangunan sosial, politik dan budaya yang terkenal dengan reaktualisasi ajaran islam. Mereka lebih kreatif dan variatif sehingga dengan begitu sering kontroversial satu dengan yang lain. Hal ini bisa dimaklumi melihat latar belakang keilmuan yang berbeda sehingga memiliki sudut pandang menyoroti masalah yang berbeda pula. Tampil pada periode ini seperti Nurcholish Madjid, M. Amin Rais dan Syafi'i ma'arif yang berangkat dari keluarga santri kemudian mengambil Ph.D di Universitas Barat. Yang berasal dari pendidikan umum, tapi lebih dikenal sebagai cendekiawan muslim dapat disebut nama Dr..Ir. Imaduddin Abdulrahim dari ITB, Prof.DR.Ir. A.M. Syaifuddin dari IPB, DR. Kuntowijoyo, Prof. M. Dawam Rahardjo, Dr.Ir. M. Amin Azis, Drs. Djalaluddin Rahmat dan sebagainya⁸⁰

Sampai disini para cendekiawan muslim yang tampil dilevel nasional sudah cukup banyak secara individual (independen), polemik antar mereka sering mewarnai media massa, namun jarang menghasilkan konsensus yang dapat mewarnai keputusan Birokrasi. Akan tetapi secara pasti kreatifitas pemikiran mereka telah membangunkan generasi

79. Abdul Azis Thaba, Op-Cit, hal 331

80. *I b i d*, hal 332

berikutnya, menggiring untuk bangkit memperjuangkan nilai-nilai baru islam yang telah mereka rintis secara inofatif. Periode berikutnya muncul nama-nama yang tergolong intelektual muslim lebih banyak lagi, diantaranya Din Syamsuddin, Syafiq A. Muqhlis, Azyumardi Azra, Bachtiar Effendy dan lain-lain.

Menurut Nurcholish Madjid, tahun 1970-an kalangan islam Indonesia panen sardjana, jumlah cendekiawan muslim saat itu belum seberapa, masih lebih banyak muslim cendekia, tapi kurang memiliki komitmen keislaman. sampai-sampai ada ungkapan keprihatinan dari Muhammad Zaenuri "Selama ini ummat Islam terasa minoritas padahal mayoritas"⁸¹.

Tampilnya cendekiawan muslim secara individual tersebut amat jauh dari sentuhan/menyentuh akar problem rakyat kecil, mereka berpolemik dari teori ke teori yang mereka fahami sendiri, seakan mereka tampil diatas menara gading yang jauh tersekat dari tema kemelaratan masyarakat mayoritas muslim.

Kesadaran kolektif untuk membentuk wadah cendekiawan pernah dirintis pada tahun 1964, dengan nama Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami) di Mega Mendung, Bogor dengan diketuai oleh Subchan Z.E. organisasi ini mengalami perpecahan pada tahun 1968⁸². Kemudian pada tahun 1968 dari pecahan itu kalangan NU dari PMII mendirikan Ikatan Sarjana

81. Prospek, 24 Nopember 1990

82. Robert W. Hefner, Op-Cit, hal. 52

Islam Indonesia (ISII).

Pada dekade 1980-an, Indonesia mulai kebanjiran Sarjana, mereka yang belajar S-2 dan S-3 di luar negeri juga mulai berdatangan, membawa kepedulian yang positif terhadap islam, mengambil masjid kampus sebagai sentralnya. Kesibukan-kesibukan seminar, kongres maupun simposium mewarnai aktifitas yang semakin marak.

Tercatat selama kurun waktu tahun 1985 saja; beberapa kali seminar nasional tentang keislaman digelar. Bulan februari, di IAIN Sunan Kalijaga digelar seminar Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam se-Indonesia; April, para dokter muslim mengadakan seminar kesehatan Indonesia tahun 2000; Mei, Universitas Islam Sultan Aqung Semarang menggelar simposium Citra Kampus Religius; Fisip UI setidaknya dua kali mengadakan percakapan cendekiawan tentang islam, yaitu tahun 1985 dan tahun 1987.⁸³ Segala aktifitas tersebut berskala nasional, dengan mengundang para pakar muslim yang sesuai dengan bidangnya, hal ini menunjukkan betapa cendekiawan muslim punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan bangsa.

Dari pertemuan-pertemuan itu kembali muncul ide untuk membentuk wadah yang menampung aspirasi para cendekiawan. Maka tidak kurang dari 165 cendekiawan muslim pada tanggal 16-28 desember 1984, berkumpul di Ciawi Bogor

83. Laporan Khusus, Riwayatmu Cendekiawan Muslim, Prospek, no. 12, 15 Desember 1990.

menyelenggarakan teman "Perspektif Islam Dalam Pembangunan Bangsa". Pertemuan itu berkelanjutan, maret 1986 mereka bertemu di Bandung membentuk Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FKPI). Terpilih sebagai ketua Ahmad Tirtosudiro dengan sekjennya pertama Dawam Rahardjo, kemudian Adi Sasono. Organisasi ini berbasis LSM dan Kampus.⁸⁴

Upaya paling akhir untuk membentuk asosiasi Cendekiawan Muslim terjadi januari 1989, ketika Imaduddin Abdulrahim dan Dawam Rahardjo mengundang 50 cendekiawan ke Yogyakarta, 40 diantaranya hadir. Namun, pada hari kedua polisi datang dan membubarkan pertemuan, dengan alasan bahwa pertemuan itu belum mendapatkan izin dan karenanya illegal. Para peserta menuduh Benny Murdani, Kristen-Jawa yang menjabat Menhankam sebagai penyebab pembubaran itu.⁸⁵

Muhammadiyah juga menyadari bahwa kehadiran ikatan cendekiawan muslim adalah merupakan suatu kebutuhan untuk memacu potensi ummat islam yang mayoritas di negeri ini dan juga untuk mengejar ketinggalan. Prof. Ismail Sunny menyatakan, "Menurut rencana akan dikonkritisikan dalam muktamad Muhammadiyah bulan januari 1991 di Yogyakarta untuk membentuk Ikatan Cendekiawan Muhammadiyah, tapi diurungkan setelah ICMI terbentuk".⁸⁶

84. *Prospek*, no. 12, 15 Desember 1990

85. Robert W. Hefner, Op-Cit, hal 55.

86. *Panji Masyarakat* no. 669 21 Desember 1990

Awal tahun 1990 Dr. Imaduddin berkunjung ke Unibraw Malang, pada saat yang sama kehadirannya dilarang pada sebagian kampus termasuk kampusnya sendiri ITB. Beberapa waktu menyusul pembicaraan, Dr. Imaduddin sendirilah yang mengajukan inisiatif dan mendorong mahasiswa agar merancang gagasan simposium, sukur bila sampai pada tingkat nasional.⁸⁷ pada pertengahan 1990, gagasan itu benar-benar diperjuangkan oleh lima mahasiswa Unibraw dan ide besar itu menelorkan kesuksesan membentuk ICMI pada akhir tahun itu juga.

Peran Imaduddin, peran mahasiswa dan peran tokoh cendekiawan lain dalam proses peristiwa terbentuknya ICMI secara kelembagaan pada penghujung 1990 itu, merupakan katalisator dari buah terobosan kultural yang panjang, membentuk kristalisasi semangat, dilatarbelakangi dinamika perpolitikan yang menegangkan plus ketiadaan partai politi islam tempat penyaluran aspirasi politik, juga keterbelakangan bangsa menapaki abad XXI semakin mendorong cendekiawan muslim meningkatkan perannya pada berbagai bidang kehidupan, menginternalisir diri, berisasasi dengan sesama hanya tampil ikut terlibat sebagai penentu kebijakan nasional, menepis kesan marjinal yang asing dirumah sendiri.

Seruan untuk mengadakan simposium di Malang, merupa-

87. I b i d, hal 56

kan titik picu dari letupan-letupan semangat tersebut. maka dari itu tidak heran bila gaung suara bedug dan takbir yang ditabuh oleh Presiden Suharto dan diteriakkan peserta simposium dengan penuh haru di gedung pertemuan itu, menggema menerobos, mengetarkan setiap hati yang sadar akan keislamannya, membahana diseluruh nusantara, hampir semua orang yang sadar terhenyak, sebagian bersukur (umat islam mayoritas), sebagian bingung (pengamat politik Indonesia), sebagian laqi khawatir, bahkan ada yang benci dan melecehkan.

Terbentuknya ICMI itu memberikan kesimpulan akhir karena dipengaruhi beberapa faktor, terobosan kultural cendekiawan muslim, peran mahasiswa pelopor dan sikap akomodasionis pemerintah dengan perkembangan politik orde baru yang semakin melunak terhadap ummat islam.

3. Azas Dan Tujuan Organisasi

Dari Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ICMI dijelaskan bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang disingkat ICMI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan dan kebudayaan yang menghim-pun para cendekiawan muslim se-Indonesia atas dasar kesamaan cita-cita dan profesi kecendekiawan⁸⁸. Sedangkan azas

organisasi adalah Pancasila.⁸⁹

Tujuan Organisasi ICMI adalah meningkatkan mutu kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia dalam pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan tata kehidupan manusia yang damai, adil, sejahtera lahir batin, yang diridloai Alloh Subhanahu wata'ala.⁹⁰

Lebih jauh tentang sifat dan ciri-ciri organisasi ICMI dapat dibaca pada lampiran I dan II tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICMI.

4. Struktur Organisasi ICMI

Pada hari rabu 13 februari 1991, satu bulan lebih lima hari setelah simposium di Malang, Habibie mengumumkan personal pengurus paripurna organisasi itu yang berjumlah 137 orang. Mereka terdiri dari 17 pengurus lengkap, 45 dewan penasehat, 28 dewan pakar, 30 ketua bidang dan 17 koordinator wilayah (Korwil).

Dalam kepengurusan itu Habibie tetap menjabat sebagai Ketua umum, dan sebagai Sekretaris pelaksana adalah Wardiman Djoyonegoro, deputi ketua BPPT bidang Administrasi. Sebagai ketua Dewan Penasehat Emil Salim, dengan Wakil Ketua K.H. Ali Yafie dan Tuty Alawiyah. Dewan Pakar di

89. Anggaran Dasar ICMI Pasal 4

90. Anggaran Dasar ICMI, pasal 5

Ketua oleh Ahmad Baiquni, dengan wakil Nurcholish Madjid dan M. Dawam Rahardjo.⁹¹

Khusus organisasi wilayah, menurut Habibie, akan disesuaikan dengan pusat. Masing-masing Korwil dibantu oleh sedikitnya enam divisi yang merupakan penjabaran dari enam departemen yang ada ditingkat pusat. Diasamping itu Korwil juga membawahi organisasi fungsional yakni organisasi satuan (Orsat) yang merupakan susunan organisasi terbawah. Namun mereka justru lebih banyak bersifat pelaksanaan operasional kegiatan-kegiatan organisasi. Sementara Organisasi satuan yang ditetapkan menjadi anggota ICMI, harus terdiri anggota yang memiliki latar belakang ilmu, disiplin atau profesi yang berbeda. Sebagai persyaratan lainnya, organisasi satuan itu harus memiliki sedikitnya 25 anggota.⁹²

Organisasi ini memakai struktur matriks, tanpa kursi sekjen. Dengan struktur ini Habibie kehendak agar ICMI cepat melaju, semua fungsionaris berhubungan langsung dengan Ketua Umum. Maksudnya, agar komunikasi atas-bawah bisa lebih lancar, tidak tersendat birokrasi yang rumit. "Dengan struktur ini, setiap langkah organisasi bisa sinkron dengan keinginan pimpinan", komentar Imaduddin.⁹³ Disini

91. *Warta Ekonomi*, no. 38, 18 februari 1991, dinukil dari Abrar Muhammad, Op-Cit, hal 133

92. I b i d.

93. Laporan, Matriks Habibie dan Tolakan Dawam, *Prospek*, no. 18, 2 Februari 1991 (Abrar Muhammad, Hal. 119)

timbul perbedaan pendapat dengan Dawam Rahardjo. Dawam menilai struktur ini akan menempatkan Habibie sebagai tokoh sentral (*one man show*). Katanya, Ketua umum ICMI itu lebih percaya pada inner circle-nya dan enggan bermusyawarah dengan para cendekiawan. Terbukti rancangan Tawang Mangu sama sekali tidak diqubris oleh Habibie.

Menurut dawam jabatan Sekjen mutlak diperlukan, tidak saja karena ICMI diperkirakan bakal menjadi organisasi dengan anggota yang besar, juga Ketua Umum Habibie dengan jabatan yang begitu menumpuk diperkirakan akan cukup sulit membagi waktu dan pemikirannya buat ICMI. Namun Habibie punya pertimbangan lain dan tetap bertahan pada pendiriannya.⁹⁴ Rupanya, Dawam sangat kecewa dengan kekakuan sikap Habibie itu, sehingga dia mengeluarkan uneg-uneg kekecewaannya itu dengan menulis artikel berjudul "Seandainya Saya....." yang dimuat dalam Berita Buana tanggal 14 Januari 1991. Tulisan yang mengkritik Habibie dengan sindiran yang bernada sinisme dan sarkasme.

Sebagian orang mendukung Habibie, dan ada pula yang mendukung Dawam, namun kebanyakan menanggapi system apapun yang akan diterapkan Habibie dengan pasrah (skeptis), seperti Emil Salim Ketua Dewan Penasehat ICMI menganggap soal silang pendapat mengenai organisasi model matriks masih terlalu pagi."What ever deh dengan bentuk, mau ma-

94. Laporan, "Seandainya Saya Dan ICMI Tanpa sekjen", *Editor*, no. 21, 2 Februari 1991 (Abrar muhammad hal. 116)

triks kek atau apa, yang penting isinya".⁹⁵

Alhamdulillah, berkat kesadaran pentingnya ukhuwah Islamiyah untuk membangun organisasi yang baru berdiri ini, polemik itu pun bisa diakhiri dengan saling tafahum. Habibie dapat meyakinkan Dawam untuk diajak rukun, sehingga pada saat struktur organisasi itu dibacakan diiringi dengan peluk senyum Dawam dan habibie.

Susunan pengurus pusat ICMI periode 1991-1995 selengkapnya dapat dilihat di lampiran ke-III karya tulis ini. Diantara pengurus itu ada yang mundur sebelum berakhir masa jabatan, antara lain Ainun Nadjib bidang dialog kebudayaan, dan Aswab mahasin SH, Ketua Bidang Pendidikan dan latihan.

Pada Muktamar ke-II ICMI dan Simposium Nasional di Jakarta tanggal 7-9 Desember 1995, terjadi perubahan susunan pengurus ICMI 1995-2000. Beberapa wajah baru memasuki susunan kepengurusan memperkuat beberapa pengurus lama yang kembali terpilih (Ketua umum tetap Prof. B.J. Habibie), mereka diantaranya Menperindag Tunaki Ariwibowo dan Begawan ekonomi Sumitro Djoyohadikusumo, Presiden H.M. Soeharto bersedia menjadi pelindung. Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wapres H. Umar Wirahadikusuma dan H. Sudharmono turut duduk di Dewan Pembina. Mereka semua duduk di kepengurusan ICMI selaku pribadi. Selengkapnya, susunan pengurus

95. Laporan, Payung ICMI Dengan Makna Ganda, *Editor*, no. 23, 16 februari 1991 (Abrar Muhammad hal. 127)

ICMI periode-II ini dapat dilihat di lampiran IV.

Yang menarik dari kepengurusan baru ini dibentuknya Sekretaris Umum yang dijabat oleh Adi sasono⁹⁶ yang nota-bene sepak terjangnya identik dengan sesepuh LSM garis keras. Artinya pasangan Habibie dan Adi Sasono bisa diibaratkan sebagai simbul bertemu "Negara dan Non Negara". Sekaligus sistem kepengurusan ini meruntuhkan sistem matriks yang sebelumnya menjadi polemik dikalangan cendekiawan. Dengan sistem ini ketergantungan terhadap habibie sedikit demi sedikit bisa dikurangi. Amin Rais mengakui bahwa memang pada batas tertentu telah terjadi ketergantungan itu.

Personel kepengurusan itu terdiri dari 158 orang, lebih banyak 21 orang dari periode sebelumnya. Mereka terdiri atas Pelindung, 10 orang Dewan Pembina, 46 Dewan Penasehat, 27 Dewan Pakar, 25 Pendurus Lengkap dan 49 Ketua Bidang. Pada kepengurusan ini juga ada penambahan departemen dari enam menjadi 10 departemen.

B. PROGRAM-PROGRAM ICMI

Simposium Cendekiawan Muslim di malang telah membekali ICMI dengan program-program globalnya, sebagai cerminan dari pelaksanaan AD/ART organisasi⁹⁷. Disebutkan dalam

96. *Republika*, Minggu 10 desember 1995

97. *Ummat*, no. 12, tahun I, 11 desember 1995

Bab V pasal 7 Anggaran Dasar ICMI tentang program kegiatan, yang berbunyi : **98**

Untuk mencapai tujuannya dan dalam rangka menegakkan kebijakan mencegah kemungkaran, ICMI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menyelenggarakan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kalangan , baik perseorangan, lembaga, perhimpunan, pemerintah maupun swasta.
2. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya ummat Islam Indonesia.
3. Meningkatkan mutu para anggota serta mengembangkan kegiatan kepakaran melalui koordinasi sistem jaringan informasi dan komunikasi antara sesama cendekiawan serta dengan kelompok, lembaga dan organisasi didalam maupun diluar negeri.
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pemikiran, penelitian dan pengkajian yang inofatif, strategis dan antisipatif serta berupaya merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis lokal, regional, nasional dan global.
5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka

98. Anggaran dasar ICMI, Bab V Pasal 7, lihat Imron Nasir, "ICMI Pluralitas Pemahaman Islam Indonesia", editor Zuli Qodir Dan lalu m. Iqbal Songel, "ICMI, Negara Dan Birokratisasi", kel. Study Lingkaran, Yogyakarta, 1995, hal. 37

meningkatkan taraf hidup dan martabat rakyat kecil dan kaum lemah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian dalam ART ICMI bab VI pasal 20 yang memuat 8 ayat, berisi penjabaran program kegiatan itu secara lebih rinci. Sedangkan perwujudan program riil dalam pelaksanaan, menurut Dr. Haryanto Dhanutirto salah seorang Asisten Sekretaris ICMI dan Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan VI, berpedoman pada sistem kenegaraan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sasarannya dalam bentuk program tunqal 5 K ICMI. Yaitu :

1. Kualitas Iman
2. Kualitas Hidup
3. Kualitas bekerja
4. Kualitas berkarya
5. Kualitas berfikir.⁹⁹

Program 5 K ini disusun dan disepakati pada Silaknas I ICMI tangqal 5 desember 1991 di Jakarta ¹⁰⁰

Program ICMI yang diformulasikan dalam program tunqal 5 K itu, masing-masing dijabarkan lagi dalam bentuk yang lebih khusus dalam departemen-departeman yang kemudian menterjemahkan program-program pokok kedalam pelaksanaan program secara nyata. Hasil usahanya selama 5 tahun pertama

99. *Jawa Pos*, 10 september 1995

100. *Pelita*, 5 desember 1991.

antara lain dapat disebut¹⁰¹

Departemen Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, mengembangkan ICMI NET (*Information Centre for Motivating Innovation Work*), dengan program ini dilaksanakan program ketram-pilan di perusahaan industri dan jasa. Adapula Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT), yang menyiapkan pesantren politeknik di Pesantren Arafah dan Al-Muhajirin di Jawa barat, As-Syakirin di Riau dan Nurul Quro di Maluku utara.

Departemen Ilmu Ekonomi Dan Kemasyarakatan, antara lain telah melakukan sumbangan pemikiran dalam pembuatan GBHN 1993, pada RUU Koperasi membantu perumusan peraturan Bank Muamalat, mendorong pembentukan Badan Arbitrase Muamalat, dan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Wanita. Bidang Pembinaan ekonomi lemah telah melakukan program BPRS (Badan Perkreditan Rakyat Syariat) dengan menyertakan saham ICMI sebesar Rp. 15 juta disetiap BPRS di 13 Propinsi.

Departemen Sumberdaya Manusia Dan Pembudayaan, melaksanakan kerjasama dengan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta untuk menyusun dan membuat data base. Dari bidang inipula diberikan beasiswa untuk 1500 siswa/mahasiswa serta membentuk Yayasan beasiswa Amal Abadi, Beasiswa Orang Tua Bimbing Terpadu (ORBIT) yang baru memperoleh dana Rp. 1,2 milyar.

Departemen Pembinaan Ummat, telah turun tangan

101. *Forum keadilan*, no. 19, tahun IV, 1 januari 1996, menukil dari laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada Muktamar II ICMI, yang dibacakan oleh Ketua Umum ICMI B.J. Habibie

membantu mengatasi persoalan masyarakat Kedungombo "Meskipun penanganan belum mengatasi permasalahan secara tuntas, setidaknya dapat memeringan beban penderitaan masyarakat" Kata Habibie, sambil menunjuk sertifikasi 3000 bidang tanah¹⁰²

Dari program-program itu ICMI menggaris bawahi tiga jenis program unggulan, yakni : Program Gerakan Wakaf Buku, program Beasiswa Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) dan program Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berasal dari konsep baitulmaal wat-tamwiil (BMT), sekalipun program ini baru dikembangkan dalam tiga tahun terakhir. Habibie menyatakan program ini telah berkembang.

Eksistensi ketiga program ini dipertegas lewat penandatanganan prasasti oleh Bapak Presiden Soeharto pada pembukaan Mukatamar-II, ditambah satu prasasti program Indonesia Media Network (IMN) yaitu jaringan yang diprakarsai CIDES dan Republika untuk menyebarluaskan informasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia-- mengenai Indonesia melalui internet ke seluruh dunia.¹⁰³

Pada sambutannya di pembukaan Mukatamar-II, Presiden menilai "ICMI telah mengambil langkah-langkah penting dalam memajukan perekonomian rakyat, misalnya dengan membentuk BPR-BPR". Ungkapan ini senada dengan semangat ICMI membentuk Baitul maal Wat-tamwiil yang diupayakan untuk memacu

102. *Republika*, jum'at, 8 desember 1995, hal. 15

103. *Republika*, jum'at, 8 desember 1995, hal 5

membantu mengatasi persoalan masyarakat Kedungombo "Meskipun penanganan belum mengatasi permasalahan secara tuntas, setidaknya dapat memeringan beban penderitaan masyarakat" Kata Habibie, sambil menunjuk sertifikasi 3000 bidang tanah¹⁰²

Dari program-program itu ICMI menggaris bawahi tiga jenis program unggulan, yakni : Program Gerakan Wakaf Buku, program Beasiswa Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) dan program Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berasal dari konsep baitulmaal wat-tamwiil (BMT), sekalipun program ini baru dikembangkan dalam tiga tahun terakhir, Habibie menyatakan program ini telah berkembang.

Eksistensi ketiga program ini dipertegas lewat penandatanganan prasasti oleh Bapak Presiden Soeharto pada pembukaan Mukatamar-II, ditambah satu prasasti program Indonesia Media Network (IMN) yaitu jaringan yang diprakarsai CIDES dan Republika untuk menyebarluaskan informasi --dalam bahasa Inggris dan Indonesia-- mengenai Indonesia melalui internet ke seluruh dunia.¹⁰³

Pada sambutannya di pembukaan Mukatamar-II, Presiden menilai "ICMI telah mengambil langkah-langkah penting dalam memajukan perekonomian rakyat, misalnya dengan membentuk KPR-BPR". Ungkapan ini senada dengan semangat ICMI membentuk Baitul maal Wat-tamwiil yang diupayakan untuk memacu

102. *Republika*, jum'at, 8 desember 1995, hal. 15

103. *Republika*, jum'at, 8 desember 1995, hal 5

aktifitas ekonomi masyarakat kecil bawah yang tergolong pengusaha sangat kecil¹⁰⁴. Saat ini tidak kurang dari 500 BMT telah berdiri.

Sisi lain yang patut dicatat dari pengembangan program ICMI selama periode pertama yaitu berdirinya badan-badan otonom, sampai sekarang (awal 1996), ICMI telah memiliki 13 badan otonom. Mulai dari Yayasan Abdi Bangsa, PT. Abdi Bangsa yang menerbitkan koran Republika, PT. Syarikat Takaful Indonesia, PT. Karya Abdi Bangsa, Central for Information and Development Studies (CIDES), Gerakan Wakaf Buku, Majlis Sinergi Kalam (MASIKA), Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orbit, sampai sentra Islam yang segera dibangun !¹⁰⁵

Perihal koran Republika, media massa harian yang mulai terbit tanggal 4 januari 993 ini dimaksudkan ICMI untuk memimpin opini publik, menjadi media yang mentransformasikan kognisi dan nurani masyarakat Islam ke suatu peradaban aqamis yang siap untuk memasuki era globalisasi¹⁰⁶. Pada bulan juli 1995, ICMI juga menerbitkan sebuah majalah Dwi Mingguan bernama UMMAT¹⁰⁷

Sedangkan Central for Information and development

104. I b i d, hal 14

105. *Forum Keadilan*, no. 19, tahun IV, 1 Januari 1996

106. Ahmad Bahar (editor), "ICMI Kekuasaan dan Demokratisasi", PT. Pena Cendekia Indonesia. Yogyakarta, 1995, hal. 168.

107. I b i d, hal 158

Studies (CIDES) adalah "Think tank"-nya ICMI, pusat penelitian dan diskusi ini diprakarsai oleh Adi sasono dan Dewi Fortuna Anwar yang tergolong muslim independent lantang (vokal)¹⁰⁸. badan ini telah menerbitkan sejumlah buku, penelitian, dua bulletin dan jurnal Afkar yang telah mulai terbit februari 1993, selain juga menyelenggarakan seminar-seminar nasional maupun internasional¹⁰⁹.

Untuk mengembangkan semangat intelektualisme di kalangan generasi muda, ICMI menghimpun anak-anak muda dalam wadah MASTRA (Majlis Sinergi Kalam), yang mendorong generasi muda dan memberi kesempatan mengembangkan study dan wacana pemikiran ke-Islaman dan kemasyarakatan secara kritis.¹¹⁰

Perjalanan ICMI selama satu periode dengan sarat program itu, telah membuktikan eksistensinya di pentas sejarah nasional, yang cukup dapat dibanggakan ummat islam, apalagi mengingat umurnya yang masih tergolong Balita dan komposisinya yang sedemikian heterogen, dalam kondisi seperti itu umurnya sebuah organisasi baru masih disibukkan dengan urusan konsolidasi.

Namun hal itu ternyata tidak menina bobokkan ummat Islam, untuk sama sekali tidak mengintrospeksi ICMI secara kritis. Koreksi program ICMI dilontarkan oleh baik orang

108. Robert W. Hefner, Op-Cit, hal. 73

109. *Ummat*, no. 12, tahun I, 11 desember 1995, hal. 21

110. I b i d

dalam maupun orang diluar ICMI. Secara umum koreksi itu menyoroti pada realisasi program ICMI yang terlalu elitis, terjebak dalam isu teknokrasi. Sebagai contoh, beberapa hari setelah simposium di Malang Ketua Umum ICMI pernah mengatakan :

"Nanti yang kita ajarkan kepada ummat bukan Al-Qur'an dan hadits Nabi, sebab hal itu merupakan tugas ulama, tapi bagaimana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertanian, perkebunan, engineering dan sebagainya. Itulah yang perlu kita prioritaskan".¹¹¹

Ungkapan itu nampak menciptakan dikotomi tugas cendekiawan dengan ulama dan terjebak pada teknokrasi yang jauh dari problematika *grass roots*, efeknya banyak problematika rakyat kecil yang memang belum tersentuh ICMI, konon Ainun Nadiib keluar dari ICMI juga sebab pada saat menaigh janji Habibie untuk menangani kasus Kedungombo tidak mendapat tanggapan yang layak. Juga jauhnya kaum muda dari ICMI sebab jauhnya ICMI dari problem akar rumput itu. Abdul Munir Mulkhan Kolumnis dan juga Tokoh Muhammadiyah, menilai dalam usia lima tahun ini ICMI masih damang ketika berhadapan dengan isu-isu buruh dan tanah dan sebagainya, padahal disitulah kalanigan mahasiswa dan LSM memberikan perhatian yang besar, karena itu kata Mulkhan, lumrah bila sebagian kartini muda belum tertarik pada ICMI.¹¹²

111. *Amanah*, no. 116, tanggal 14 desember 1990

112. *Republika*, Kamis 7 desember 1995, hal. 11 lihat Isnaini Muallidin, Perjuangan Cendekiawan Muslim dibawah Negara Orde baru: Potret Keberadaan ICMI, dalam Zuli Qodir Dan M. Iqbal Songel (edit.), Op-Cit, hal. 96

Adi Sasono membenarkan hal itu, maka begitu dalam muktamar-II ICMI di Jakarta dia terpilih menduduki pos Sekretaris Umum periode 1995-2000 dia segera memproklamirkan bahwa masalah ketimpangan sosial menjadi agenda utama ICMI¹¹³. Agenda strategis itu selengkapnya menurut Adi Sasono menyangkut masalah Kolusi, pemberdayaan ekonomi rakyat, pertanahan dan otonomi daerah. Agenda ini dituangkan dalam rekomendasi muktamar-II ICMI setelah digodok dalam tim.

Dr. Kuntowijoyo, menilai ICMI adalah gerakan sosial kebudayaan sejak berdirinya. Agenda kultural yang diembannya berupa mobilitas soial ummat Islam jangka Panjang bukan gerakan radikal jangka pendek. Lebih jauh dia mengatakan:

"Kita sadar bahwa ummat dan masyarakat bawah yang sudah terlalu lama menderita tidak lagi sabar menunggu. Tetapi harus ada yang berani berinvestasi jangka panjang seperti ICMI. Sudah banyak Orpol, Ormas dan LSM yang berorientasi jangka pendek: Dari pada menarik-narik ICMI lebih baik membuat mereka efektif".

Kesimpulan dari ungkapan ini bahwa diharapkan Ummat sabar dan sadar akan beban yang diemban ICMI, bahwa ketegesaan akan menyebabkan ummat Islam sendiri yang terjerembab kedalam pekatnya lumpur sejarah, terjebak janji-janji palsu yang memabukkan, seperti pengalaman "Revolusioner"

113. *Republika*, Minggu 10 Desember 1995

menjelang 1965¹¹⁴

C. ICMI DI PENTAS POLITIK NASIONAL

1. ICMI Dan Manuver Politik Habibie

Sejarah mencatat, perkembangan ICMI pasca simposium di Malang 6-8 desember 1990 yang sekaligus menandai kelahiran organisasi ini, demikian pesatnya. Organisasi yang berangkat dari ide sederhana 5 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang untuk menghimpun dan mempersatukan potensi para cendekiawan muslim yang terpecah-pecah, kini (setelah 5 tahun) ikut membentuk lanskap politik negeri ini.

Dalam jangka waktu satu periode (5 tahun), perkembangan organisasi itu sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, Eropa, Amerika, Australia, Jepang dan Timur Tengah¹¹⁵. Jumlah anggota sekitar 45.000 orang, mulai dari para pakar dari berbagai disiplin ilmu, birokrat, menteri, sampai pelawak dan penyanyi. Di dalam negeri, ada 28 Orwil yang terdiri atas 387 Orsat dan 8 Orwil dengan 51 Orsat di luar negeri.¹¹⁶

114. Kuntowijoyo, ICMI Mobilitas Dan Demokratisasi, *Republika*, 6 Desember 1995, hal 16

115. *Ummat*, no. 12, tahun I, 11 Desember 1995, hal 18

116. *Forum Keadilan*, no. 19, tahun IV, 1 Januari 1996, hal 108

Pada 7-9 desember 1995, ICMI mengadakan muktamar yang ke-II, menggelar simposium Nasional dengan Tema "Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka". Sekitar 1200 orang hadir dalam Muktamar-II ICMI yang dibuka secara resmi oleh Presiden Soeharto dan dimeriahkan dengan sejumlah acara, antara lain pencanangan gerakan Nasional Iqro', Wakaf Buku, Reasiswa Orbit dan Baitul-Maal Wattamwil (BMT).

Perkembangan ICMI yang sedemikian dramatis, ditambah komposisi kepenurusan yang ramai dengan orang-orang yang duduk di Pemerintahan, Pasca Muktamar-II tercatat Presiden tampil sebagai Pelindung, Wapres sebagai Penasehat, 16 menteri Kabinet Pembangunan VI duduk di berbagai kepengurusan, belum lagi mantan Wapres ataupun mantan menteri Kabinet sebelumnya, plus para pemegang jabatan pemerintahan yang lain ataupun di pos-pos lembaga Yudikatif maupun Legislatif, cenderung mengundang interpretasi orang kearah tampilan ICMI dalam kondisi dan situasi dinamika politik Nasional sekarang dan yang akan datang. Ekornya membuatkan persangkaan bahwa ICMI organisasi yang tidak mandiri terjebak oleh gelimang kekuasaan, ICMI terkooptasi oleh negara ataupun sebaliknya, tidak independen, mengembangkan prioritasialisme dan lain-sebagainya.

Pada galibnya, ICMI memang tampil bagaikan burung merak, yang indah, disukai, tapi tak jarang dicurigai, dicemburui terkadang malah dibenci. Tuduhan bahwa ICMI menjadi fenomena bibit bangkitnya sektarianisme dan eksklu-

sifisme Islam serta bermain di ladang politik praktis dilontarkan banyak pengamat dan pelaku politik diluar ICMI.

Coba kita simak perkembangan politik akhir-akhir ini, banyak Ormas-Ormas baru bermunculan, dengan label kebangsaan, persatuan, atau yang lain. Sebut saja, Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila (PCPP), Persatuan Nasional Indonesia (PNI), Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK), Partisipasi Kristen Indonesia, bahkan belakangan ini dikumandangkan pula dikalangan ummat Islam dagasan membentuk "Masymi Baru" yang dipoles dengan singkat menarik Majlis Syaria'ah Ummat Islam Indonesia. Tumbuhnya Ormas-Ormas secara sporadis tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks keberadaan ICMI yang menimbulkan kecemburuhan dan kekhawatiran tersebut. Tabloid bulanan PB NU "Warta" edisi oktober 1995 dengan sarkastik menggambarkan adu panco antara ICMI dan PCPP di pentas politik nasional.

Reaksi yang bermunculan itu bukannya tanpa alasan yang bersifat politis, kalau kita runut perkembangan ICMI dan sepak terjang politik Ketua Umumnya Prof. Habibie di pentas politik Nasional pada 5 tahun pertama berdirinya ICMI akan kita dapat benang merah yang saling mengaitkan. Pada kondisi ini orang sulit menarik garis yang tegas antara kinerja Habibie dengan penampilan ICMI sebagai sebuah organisasi. Jadi, Habibie identik dengan ICMI atau sebaliknya.

Pengamat politik Indonesia dari dalam maupun luar negeri, juga media massa, sering mengungkapkan keterlibatan Habibie dalam berbagai peristiwa politik, baik dalam kapasitasnya sebagai menteri maupun sebagai penasehat Golkar. Sunardian Wirodono memberi gelar Habibie dengan sepak terjang politiknya sebagai manuver politik "Super Menteri"¹¹⁷. Habibie menjadi sorotan publik tatkala melakukan langkah-langkah politik yang spektakuler. Antara lain :

Pertama. Tanggal 3 juni 1993, Habibie melakukan terobosan politik dengan mengundang tokoh-tokoh "Petisi 50" ke PT PAL di Surabaya dan IPTN Bandung. Terobosan ini tergolong berani dan belum pernah dilakukan siapapun. Sebab disitu habibie berusaha mempertemukan dua kelompok berse-teru antara tokoh-tokoh Petisi 50 (Ali Sadikin dkk.) dengan pemerintah yang diwakili Pensiunan Jenderal seperti Sigitarmo, Sayidiman Suryomohardjo, Hasan Habib, Wiyogo Atmodarminto dan Laksamana Sudomo. Yang terakhir ini pernah memberi cap kelompok Ali Sadikin sebagai dessident atau pem-tingkang.¹¹⁸

Perseteruan dua kelompok itu hingga tahun 1993 sudah berumur 13 tahun, perseteruan yang panjang antara kelompok (pihak) pendirik keras kebijakan pemerintah dan si pelaku pemerintahan. Namun ditangan Habibie dengan restu

117. Sunardian Wirodono, Catatan 1993; Gerakan Politik Indonesia, Puspawara, Jakarta, 1994, hal. 99

118. I b i d, hal 65

Presiden, Ali sadikin dan Sudomo yang memang sama-sama orang AL itu, memencet tombol bersama, meluncurkan 2 kapal baru produk PT. PAL, rujuk nasional ?

Kelompok Petisi 50 adalah kelompok yang lahir dari diskusi para Pensiunan Perwira Tinggi Militer dari Tiga Divisi Kodam (Komando Daerah Militer): Brawijaya, Siliwangi dan Diponegoro yang disingkat BRASILDI pada pertengahan periode 70-80an. Mereka berdiskusi, mengkaji secara intensif berbagai isu yang berkembang saat itu dan melancarkan kritik keras terhadap Pemerintah yang dipandang belum menjalankan secara benar Pancasila dan UUD 1945. Termasuk mengkritik keras Golkar, mempertanyakan Dwi fungsi ABRI dan mengingatkan perlunya pemerataan, dan berbagai permasalahan ketimpangan lain bahkan menyangkut isu negatif terhadap Soeharto dan keluarganya¹¹⁹

Pada tahun 1980, Pemerintah (Soeharto) menanggapai kritik mereka dengan serius dan menyatakan bahwa isu-isu yang ditujukan pada dirinya dan keluarganya mungkin berasal dari pihak yang merasa usahanya mengganti Pancasila terhambat oleh Soeharto. Pidato itu mengundang reaksi keras Ali Sadikin dkk. Dari sinilah dirancang surat keprihatinan yang ditandatangani oleh 50 orang pada tanggal 5 mei 1980. Surat Keprihatinan inilah yang kemudian dinamai sebagai Petisi 50.¹²⁰ buntutnya terjadi perseteruan yang panjang, diwarnai

119. I b i d, hal 66-67

120. I b i d, hal. 68

saling memojokkan satu sama lain.

Tiga belas tahun kemudian, pada peristiwa PAL Surabaya dan IPTN Bandung, Habibie mengupayakan rujuk Nasional antara dua kubu saling berseteru itu. Upaya positif, walaupun setelah peristiwa itu pemerintah nampak mengambil sikap teqak pada pendiriannya.

Kedua. Menjelang SU MPR 1993 Habibie disebut-sebut banyak berperan dalam memasukkan sejumlah tokoh ICMI menjadi anggota MPR. Hal ini terbukti pada saat Ketua Umum Golkar Wahono membacakan susunan anggota terpilih, mereka adalah para anggota DPP Golkar, yang sebagian masih menjabat menteri, tokoh-tokoh Islam dan tokoh intelektual. Dalam hal ini, ICMI cukup rimbun menghijau royo-royokan Senayan¹²¹

Diantara anggota terpilih itu, muncul sejumlah nama yang selama ini dikenal sangat dekat dengan Habibie. dari BPPT, umpamanya muncul Sahala Parlin Napitupulu (Wakil Ketua), Wardiman Djoyonegoro (Deputi), Marwah daud Ibrahim (Deputi), juga Rahadi Ramlan (Deputi). Sejumlah pengurus teras ICMI yang diketuainya juga melangkah masuk Senayan, diantaranya Watik Pratiknya, Ismail sunny, atau Sucipto Wirosardjono. Masih ada sederet nama lagi di MPR dan DPR yang selama ini berada di sekeliling Habibie. Bahkan, yang membuat banyak orang kaget, John ario Katili tiba-tiba diorbitkan menjadi Wakil Ketua DPR/MPR, kendati selama ini

121. I b i d, hal. 7

belum pernah menduduki jabatan politik seperti pengurus Golkar sekalipun. Ahli Gempa ini adalah wakil Habibie di Dewan Riset Nasional¹²². Pada terakhir ini Habibie dianggap telah melakukan pemangkasan kader Golkar.

Ketika ditanya tentang tampilnya orang-orang ICMI di MPR, Habibie menyatakan bahwa mereka disitu tidak mewakili ICMI, karena ICMI bukan Partai Politik, hanya saja secara implisit diakuinya. Mereka tampil menjadi anggota MPR karena memiliki kapasitas yang cukup sebagai wakil rakyat, selanjutnya menurut Habibie mereka adalah para Cendekiawan, manusia yang bisa membaca benar-benar kehendak rakyat, dan ia ikut memberikan resonansi terhadap getaran rakyat itu sendiri¹²³.

Ketiga. Pada saat pembentukan Kabinet Pembangunan VI, disitu kembali muncul nama-nama yang selama ini dikenal dekat dengan Habibie Menristek sekaligus Ketua Umum ICMI. Antara lain Wardiman Djoyonegoro (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Haryanto Dhanutirto (Menteri Perhubungan), Satrio Budihardjo Joedono (Menteri Perdagangan) dan Djama-loeddin Suryo Hadikoesomo (Menteri Kehutanan)¹²⁴. Keempatnya kebetulan anggota ICMI, bahkan Wardiman adalah Sekretaris Pelaksana, sedangkan Haryanto Dhanutirto asisten IV.

Ketika dikonfirmasikan tentang keberadaan anggota

122. *Tempo*, 10 Oktober 1992

123. I b i d, hal. 26

124. *Tempo*, 27 maret 1993, hal. 15

ICMI di Kabinet Pembangunan VI ini, Habibie tetap menolak bahwa mereka mewakili ICMI. Mereka bukan mewakili ICMI, mereka masuk Kabinet karena mereka adalah Birokrat top yang mulai merangkak dari bawah. Contohnya adalah Wardiman Djoyonegoro di BPPT jabatannya adalah Deputi bidang administrasi. Dia juga pembina proyek-proyek perencanaan energi BPPT. Kebetulan di lingkungan ICMI Wardiman juga menjabat Sekretaris Pelaksana Pengurus Harian. S.B Joedono dan Haryanto juga punya karier di Birokrasi¹²⁵. Meskipun di ICMI mereka juga duduk sebagai pengurus.

Pada kasus ini habibie dituding melakukan "Penjajuan" di Kabinet, dan mengusur sejumlah teknokrat dan menteri non muslim yang telah berjasa pada Kabinet sebelumnya. Kendati tidak kurang Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa tidak mungkin Presiden Soeharto direkayasa Habibie¹²⁶.

Keempat, pada saat Munas (Musyawarah Nasional) V Golkar tanggal 20-25 Oktober 1993 "Orang kuat" Habibie kembali menjadi sorotan publik media massa dan pengamat politik nasional. Sukses Harmoko terpilih menjadi Ketua Umum, dianggap berkat Habibie. Sehingga Habibie dituduh telah melakukan menuver politik yang "menqganjal" tampilnya

125. *Tempo*, 27 maret 1993, hal. 15 dan lihat "Yang Terharu Dan yang Terkaum-kaum" pada hal. 19-26

126. *Ummat*, no. 12 tahun I, 11 Desember 1995 hal. 19

Calon Ketua Umum dari kalangan Militer¹²⁷

Suasana Munas yang melempem, menunjukkan bahwa disana demokrasi telah terpotong!¹²⁸ Ada mekanisme yang tak transparan dari atas yang merekayasa menumpulkan demokrasi di organisasi politik terbesar yang mengaku pelopor demokrasi itu. Kabarnya, Menristek habibie berperan sentral dalam mekanisme itu, Ketua Umum ICMJ itu kebetulan menjabat Koordinator Harian Dewan Pembina yang langsung berhubungan dengan Dewan Pembina --Lembaga penting dan amat berwibawa di Golkar-- yang dipegang oleh Presiden Soeharto.

Menurut konstitusi Golkar, Ketua Dewan Pembina berwenang membatalkan keputusan DPP Golkar, malah sampai membekukan Pengurus DPP Golkar. Banyak kalangan menilai bahwa pada kondisi ini Golkar telah terjerumus dalam paternalistik dan selalu menunggu restu Pak Harto¹²⁹. Yang terjadi pada Munas V serupa dengan Konstitusi itu, bahkan sebelum Munas berlangsung isu tentang pencalonan Harmoko sudah merebak beserta siapa-siapa yang terorbit dan siapa yang terquisir. Habibie sebagai perpanjangan tangan DP diisukan membentuk tim enam (secara informal), arsitek suksesnya Harmoko.

Tanggal 22 oktober, hari ketiga Munas Golkar, seusai para wakil DPD memberikan pandangan umum, giliran Dewan

127. *Tempo*, 9 Oktober 1995 hal. 22

128. Sunardian Wiridono, Op-Cit,hal. 81

129. *Tempo*, 9 Oktober 1993, hal. 21-23

Penasehat (DP) menghadirkan juru bicaranya, Munawir Sjadjali (Mantan Menteri Agama) selaku wakil koordinator harian DP. Tanpa banyak kata sambutan Munawir Sjadjzali dengan tegas menyebut nama Harmoko dan Ary Mardjono sebagai Ketua Umum dan Sekjen Golkar 1993-1998¹³⁰. Para peserta terhenyak, karena baru kali ini DP menyebut nama calon terang-terangan didepan floor. Dan ini juga kali pertama, Golkar yang dilahirkan oleh ABRI dipimpin oleh kalangan sipil.

Mayjen R.K Sembiring Meliala; salah seorang Anggota F-ABRI amat kecewa dengan terganjalnya ABRI di tangan sipil tersebut. Dia mengatakan:

“...Kalaun Golkar ini sudah dikuasai oleh orang lain, kan lebih baik kita tinggalkan? yang harus diingat, selama ini yang memback-up Golkar kan ABRI? umpamanya dalam Pemilu 1997 nanti kita back-up PDI, nanti kan PDI yang menang”¹³¹

Pernyataan ini cukup menggemparkan, walaupun akhirnya dicounter oleh Mabes ABRI, bahwa itu adalah pernyataan Sembiring sebagai pribadi.

Berbagai penafsiran muncul dibenak sebagian ummat Islam, menanggapinya pernyataan Sembiring itu. Intinya ABRI lebih kecewa, Habibie telah membawa ICMI berhadapan dengan ABRI. Bila kekecewaan itu muncul dipermukaan dengan menanggap Islam sebagai kekuatan alternatif yang pantas dilawan dikhawatirkan sikap akomodatif dan harmonis yang baru saja diperoleh akan sirna dan ummat Islam kembali

130. Sunardian Wirodono, Op-Cit, hal. 93

131. I b i d, hal. 83

dipinggirkan dan dicurigai.

Apalagi ternyata, beberapa orang pengurus ICMI muncul dalam kepengurusan Golkar Periode 1993-1998. Ini kemudian menimbulkan ketidak senangan pada mereka yang terqusur dari kepengurusan dan kalangan lain yang gerah dengan sepak terjang Habibie. Kembali Sembiring menilai langkah politik habibie telah "Meretakkan Persatuan Nasional dan membahayakan masadepan bangsa"¹³²

Kelima, selain berbagai peristiwa diatas ada juga isu-isu lain yang berusaha memojokkan Habibie, misalnya Habibie telah terlibat dalam urusan pemilihan sejumlah calon Gubernur dan beberapa pejabat dibeberapa daerah tertentu. Berkembang pula kasak-kusuk, bila seseorang ingin jabatan dan karirnya menanjak perlu menjalin hubungan dekat dengan Habibie dan berbaik-baik dengan ICMI.

Tahun 1994 datang lagi isu sensitif. sebuah buku yang dicetak secara terbatas (buku putih "Tempo" ? pen.) membuat analisis tentang kemungkinan keterlibatan Habibie -- langsung maupun tidak langsung -- dalam kasus pemberitaan tiga media Nasional Tempo, detik dan editor¹³³ Analisis itu menyebutkan, pemberitaan itu makin memperluas Habibie dan kelompoknya untuk melakukan "Ekspansi Besar". Diantaranya lewat pengaruh politik Harian Republika dan peranan

132. *Ummat*, no. 12, tahun I, 11 Desember 1995, hal. 20

133. Sunardian Wirodono, *Gerakan Politik Indonesia* (Catatan 1994), Puspaswara, Jakarta, 1995, hal. 143

CIDES¹³⁴

Terakhir kasus pemberhentian S.B Joedono dari jabatan Menteri Perdagangan sebelum akhir masa jabatannya dengan alasan penggabungan dengan Departemen Perindustrian. Bocornya rahasia negara yang menimpa Haryanto Dhanutirto, sebagaimana diberitakan besar di media massa, adalah upaya rekayasa pihak luar "Menqoyang" Habibie dan ICMI.

Tak henti-hentinya gerak Habibie dan ICMI menjadi sorotan publik, menimbulkan tanggapan beraneka ragam. Bila dikelompokkan akan didapat tiga kelompok; Kelompok yang senang menanggapinya dengan harapan dan puji, Kelompok khawatir menanggapinya dengan arif dan kritis, terakhir kelompok yang benci menanggapinya dengan emosional dan mengembangkan isu-isu negatif berbau fitnah. Orang pada posisi ketiga meyakini bahwa "ICMI dijadikan kuda tunggangan politik habibie".

Reaksi kalangan ICMI mendapat gelombang tuduhan itu bermacam-macam. Adi Sasono, Sekum ICMI periode II mengatakan:

"Ah..enggak (tidak khawatir ICMI akan dijadikan alat politik). Orang ICMI kan tidak begitu bodoh untuk dipakai-pakai. Ya, secara teoritis memang bisa dipakai. Tapi kan ada kontrol organisasi: Muktamar lima tahunan, silaknas setiap tahun dan rakornas tiap satu semester".¹³⁵

Amin Rais memperkuat jawaban diatas dengan mengata-

134. *Umat*, no. 12 tahun I, 11 Desember 1995, hal. 20

135. *Forum Keadilan*, no. 19, tahun IV, November 1995, hal. 1

kan bahwa ICMI memiliki pedoman dan meletakkan kepentingan jangka panjang sangat jelas. Perhitungan-perhitungan politik jangka pendek hanya akan menjatuhkan citra ICMI sendiri. sangat naif sekali bila ICMI terjun kedalam perebutan sesuatu yang bersifat *vested interested* seperti berebut kursi legislatif ataupun eksekutif¹³⁵

Namun, Amin Rais maupun Adi Sasono tetap menghargai hak orang sebagai pribadi untuk berkiprah di dalam SDM. Tanpa membawa institusi ICMI, Seperti Pak Habibie di Golkar, Pak Syukri di PDI dan Pak Ismail Hasan di PPP. Lebih lanjut menegaskan bahwa duduknya orang-orang ICMI di eksekutif atau legislatif tidak ada kaitannya dengan ICMI. Misalnya, Wardiman Djoyonegoro atau Haryanto Dhanutirto itu sudah kader Golkar sebelum ICMI berdiri. jadi tanpa ICMI pun mereka akan duduk disana.

Kesimpulannya, warga ICMI menolak tuduhan ICMI berpolitik praktis, tuduhan itu dianilai tidak proporsional dan salah alamat, karena tidak dibenarkan melihat sebagian untuk menilai keseluruhan atau melihat kinerja Habibie untuk menilai ICMI. Karena bila dibenarkan niscaya melegalisasi pemangkasan hak kiprah SDM seseorang secara asasi.

Sementara itu, keterlibatan Habibie dalam percaturan politik diatas --bila benar yang dituduhkan-- tentu harus

135. *Bisnis Indonesia*, Minggu IV, November 1995, hal.

dilihat kapasitas SDM-nya, sejarah karier politiknya, kedekatannya dengan Pak harto, juga secara integral perkembangan konstelasi politik nasional yang saling bertautan, dan yang terpenting apakah kinerjanya itu sesuai jalur konstitusi ?

2. Realitas Politik ICMI

Hubungan yang akomodatif antara negara dan Islam sekarang ini --Yang secara transparan direpresentasikan oleh ICMI-- menunjukkan bahwa sebenarnya kehadiran ICMI memiliki akses dibidang politik. Hal ini terjadi setelah melewati perjalanan kultural yang panjang dan dialod politik antara ummat Islam dan pemerintah yang melelahkan. Tidak bisa diingkari, bahwa ICMI ikut berperan ditengah konstelasi panggung politik nasional. Walaupun seandainya tanpa merujuk pada sepak terjang Habibie dalam "menghijau royo-royokan" eksekutif dan legislatif.

Keberadaan ICMI, menurut M. Dawam Rahardjo, dimaksudkan untuk memperbaiki citra Islam.

"Soalnya, kita punya asumsi bahwa Islam itu kunci kemajuan. Kalau ummat Islam bisa maju, Indonesia pun bisa sukses, jadi partisipasi ummat Islam sangat penting. Tujuan ICMI kan mengembangkan ummat agar bisa berpartisipasi dengan jalan menghilangkan Islam dan pemerintah"¹³⁶

Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan bahan

136. *Ummat*, no. 12, tahun I, 11 Desember 1995

analisa, bahwa ICMI memainkan politik disektor informal¹³⁷

Pertama, secara teoritis bila politik diartikan sebagai perjuangan untuk mengegolkan kepentingan, ICMI tentu "berpolitik". Bagaimanapun ICMI punya kepentingan, bisa dilihat di Anggaran Dasarnya. Tujuan yang dicanangkan itu tidak mungkin terwujud tanpa saluran instrumental. Apalagi bila terkait dengan kebijaksanaan negara, maka ICMI perlu akses di jalur birokrasi dan politik kekuasaan.

Kedua, pada tataran praktek politik beberapa fungsionaris ICMI cukup berpengaruh dilingkungan kekuasaan, meski di posisi itu mereka bukan atas nama ICMI, perannya berpengaruh bagi naiknya pamor ICMI, menambah posisi tawar lebih kukuh ditingkat nasional.

Ketiga, setiap kelompok sosial apalagi berangkat dari kesadaran aktor-aktornya tentang kekuatan tawar-menawar, mereka akan selalu berupaya "memanfaatkan" potensinya untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara atau kekuasaan.

Analisis diatas, menggiring kita untuk mengakui keterlibatan ICMI dalam konstelasi politik nasional, plus memprediksi seberapa besar kekuatan tawar-menawarnya ditingkat nasional. Kemudian yang justru menjadi pertanyaan bagaimana bentuk riil sikap politik ICMI di negara yang jelas berdemokrasi Pancasila ini ? Apalagi disinyalir oleh A.M. Supriyatna seorang muda anggota kelompok study ling-

137. Analisis Laode Ida,ICMI Dan Politik Sektor Informal, *Forum Keadilan*,no. 19, tahun IV, 1 januari 1996

karan Jogjakarta, ICMI tidak berangkat dari ide atau konsep ideal tentang masyarakat Islam yang utopis sekalipun, sebagaimana gerakan Islam yang lain, yang bernuansa politik¹³⁸

Disini kita bertemu dengan titik simpul yang sulit dibuka. Alasannya pertama, ICMI memang tidak merumuskan konsep politiknya secara transparan; Kedua, ICMI ternyata memberikan kebebasan penuh bagi para pengurus maupun anggotanya untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap politiknya. Berbeda dengan Ormas Islam lain yang harus terikat dengan aturan main pengurus pusat maupun induk organisasinya.

Sekedar contoh, kita bisa bisa baca di media massa bahwaqaimana Nurcholish Madjid atau Amir santoso bicara tentang perlunya oposisi di Indonesia. Atau kritikan pedas Sri Bintang Pamungkas terhadap jajaran Birokrasi Orde Baru, ataupun Amin rais yang dengan lantang bicara tentang perlunya suksesi.¹³⁹

Pendapat-pendapat itu berfariasi dan tidak selalu sama dengan para betinagi ICMI lainnya, terutama dari kalangan birokrat. Namun bila dilihat dalam personel ICMI banyak terlibat para personel pejuang masyarakat lemah yang aspirasi demokratisnya tak banyak berubah, seperti nama-

138. Zuli Qodir Dan M. Iqbal Songel, Op-Cit, hal.

139. M.yafi'i Anwar, ICMI Dan Politik: Optimisme dan Kekhawatiran, *Ulumul Qur'an*, no. 1, vol. IV, tahun 1995.

nama Adi Sasono, Dawam Rahardjo, Amin Rais, Sutjipto Wiro-sardjono, Marwah Daud Ibrahim dan sederet nama lain. Siapa-bun yang mengakaji gagasannya akan menemukan kesimpulan tentang "Suatu masyarakat Indonesia yang demokratis dan berkeadilan".

M. Syafi'i Anwar juga mengakui bahwa ICMI merupakan bagian dari demokratisasi (dalam proses politik Indonesia). Fuad Yasin dalam sebuah resensi buku yang berjudul "ICMI, Kekuasaan Dan Demokratisasi" editor Ahmad Bahar, menulis:

"Perubahan yang dijanjikan ICMI adalah dalam bentuk terciptanya suatu tatanan masyarakat demokratis yang didasari oleh nilai-nilai etika moral keagamaan, bangsa ini menurut ICMI harus dibangun melalui suatu landasan akhlak yang luhur. Sehingga tatanan yang ada menjadi aman, damai, sejahtera penuh limpahan rahmat dari-Nya"¹⁴⁰

Maksudnya demokrasi yang dibangun oleh ICMI adalah demokrasi yang terimplementasi dalam realitas kehidupan masyarakat dengan didasari nilai moral. Demokrasi adalah bentuk teknis mekanisme sosial politik, sedangkan agama merupakan pancaran moral yang mewarnainya.

Presiden Soeharto menyebutkan, ICMI dalam 5 tahun pertama telah terbukti mengembangkan demokrasi :

"ICMI aktif mengambil prakarsa dan mempertemukan berbagai kalangan yang berbeda visi dan pendapat dalam memecahkan berbagai masalah dalam forum yang bersahabat. langkah-langkah ini besar artinya dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempunyai nilai tersendiri dalam upaya mengembangkan demokrasi dan

140. *Bisnis Indonesia*, Minggu IV, November 1995, hal.

keterbukaan"¹⁴¹

Dari realitas diatas didukung berbagai pendapat, bisa ditarik garis kesimpulan bahwa bentuk politik yang diperjuangkan ICMI adalah terciptanya suatu tatanan masyarakat demokratis yang dinilai oleh nilai-nilai etika moral keagamaan.

Untuk lebih memperjelas bentuk demokrasi yang diperjuangkan ICMI itu Dr. Kuntowijoyo, pengurus ICMI bidang Pengembangan Kebudayaan, menjelaskan :¹⁴²

ICMI menginginkan Demokrasi yang komprehensif, yang positif, yang mampu menerobos hambatan dan meretas jalan. Komposisi demokrasi itu adalah dua kaidah. Kaidah pertama, Ta'aruf, tercermin dalam Al-Qur'an surat al-Hujuraat, 49:13 yang menyatakan bahwa memang diakui keberadaan bangsa-bangsa dan suku-suku, yang dalam sosiologi modern dikenal dalam bentuk status dan kelas an-sich sebagai obyektif saling mengenal dan berpasangan.

Kaidah kedua, Syuro, terdapat dalam surat As-Syuro 42:38 berupa seruan Musyawarah. artinya, semua perbedaan antara dua pihak mesti diselesaikan dalam musyawarah.

Demokrasi komprehensif yang dimaksud Kuntowijoyo diatas adalah menyangkut, perjuangan dari keseluruhan Komponen berikut:

141. *Republika*, 8 Desember 1995, hal 1

142. Kuntowijoyo, ICMI; Mobilitas Sosial Dan Demokratisasi, *Republika*, 6 desember 1995

- a. Demokrasi Politik, dalam wujud civil society yaitu warga negara yang dominan, bukan political society dimana politisi yang dominan. Sesuai prinsip Syuro.
- b. Demokrasi sosial, dalam wujud solidaritas sosial berdasarkan ukhuwah basyariyah. Ta'aruf antara sikaya dan simiskin, sesuai kaidah pertama.
- c. Demokrasi Ekonomi, wujudnya budaya ekonomi kekeluargaan (antara individualisme dan kolektifisme) strukturasinya adalah gerakan koperasi, cerminan dari pelaksanaan ta'aruf dan syuro.
- d. Demokrasi Kebudayaan, dalam wujud mengurangi dominasi dikotomis yang menggunakan simbol-simbol kebudayaan oleh yang berstatus lebih tinggi di berbagai bidang kehidupan.
- e. Demokrasi Agama, dalam bentuk pluralisme beragama.

Penjelasan diatas berusaha memetakan bahwa perolehan ICMI dalam demokrasi politik berarti ICMI baru memperoleh seperlima dari demokrasi komprehensif yang diperjuangkannya. Karena agenda perjuangan komprehensif menyangkut selima demokrasi itu, bahkan demokrasi politik tidak lebih dari katalisator pembuka pintu gerbang perjuangan demokrasi berikutnya.

Jadi bargaining power yang diperoleh ICMI dalam perjuangan kulturalnya dimanfaatkan untuk meretas jalan terwujudnya cita-cita demokrasi komprehensif itu dalam jangka panjang; sedangkan dalam jangka pendek untuk mengegolkkan program-programnya perperiode. Bila duahal ini difahami

